

REPRESENTASI RESISTENSI PEREMPUAN TERHADAP SEKSISME DALAM FILM *SHE SAID* (2022)

Stefany Putri Feryviana Novitasari, Muhammad Bayu Widagdo

Email: stefanyputrifn@gmail.com

Departemen Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Violence and sexual harassment in the workplace remain serious issues experienced by many women, largely rooted in unequal power relations and entrenched sexist cultures that position women as a subordinate group. The film She Said (2022) portrays women's resistance to such normalized systemic sexism. This study analyzes the representation of women's resistance in the film using ambivalent sexism theory (Glick & Fiske), resistance theory (James C. Scott), and John Fiske's semiotic analysis across the levels of reality, representation, and ideology. The findings show that She Said depicts how systemic sexism operates in everyday life, frames women as active subjects of resistance through empathetic cinematic techniques, and critiques patriarchal-capitalist ideology by presenting feminism and gender-perspective journalism as counter-ideologies. Overall, the film represents collective women's resistance as a means to expose and challenge deeply rooted sexist practices, aiming to liberate women, especially victims of sexual harassment and violence, from isolation and social stigma.

Keywords: Women's Resistance, Ambivalent Sexism, Feminism, John Fiske's Semiotics.

ABSTRAK

Kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja masih menjadi persoalan serius yang dialami banyak perempuan, yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa dan budaya seksis yang menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat. Film *She Said* (2022) menggambarkan resistensi perempuan terhadap seksisme sistemik yang telah dinormalisasi. Penelitian ini menganalisis representasi resistensi perempuan dalam film tersebut menggunakan teori seksisme ambivalen (Glick & Fiske), teori resistensi (James C. Scott), serta analisis semiotika John Fiske pada level realitas, representasi, dan ideologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *She Said* menampilkan cara kerja seksisme sistemik dalam kehidupan sehari-hari, membingkai perempuan sebagai subjek aktif perlawanan melalui teknik sinematik yang empatik, serta mengkritik ideologi patriarki-kapitalis dengan menghadirkan feminisme dan jurnalisme berperspektif gender sebagai ideologi tandingan. Secara keseluruhan, film ini merepresentasikan resistensi kolektif perempuan untuk membongkar praktik seksis yang

mengakar, sekaligus membebaskan perempuan, khususnya korban pelecehan dan kekerasan seksual, dari isolasi dan stigma sosial.

Kata Kunci: Resistensi Perempuan, Seksisme Ambivalensi, Feminisme, Semiotika John Fiske.

PENDAHULUAN

Kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja masih menjadi persoalan serius yang bersifat global dan sistemik, khususnya bagi perempuan. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan sepihak yang tidak dikehendaki oleh korban, baik dalam bentuk verbal, nonverbal, visual, maupun fisik, yang menyerang martabat dan otonomi seksual individu (Farley, 1978). Fenomena ini berakar pada adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, baik berdasarkan jabatan maupun gender, yang dilegitimasi oleh budaya yang ada dalam masyarakat sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Konsekuensi yang dihadapi korban ketika menolak tuntutan seksual pelaku sangat beragam, mulai dari intimidasi, pengucilan, penilaian kinerja negatif, hambatan promosi, hingga pemutusan hubungan kerja. Situasi ini membuat korban berada dalam posisi tidak berdaya karena harus menghadapi tekanan ekonomi, ancaman terhadap keberlanjutan karir, serta stigma sosial yang melekat pada korban pelecehan seksual (MacKinnon, 1979). Kondisi tersebut berkontribusi pada

rendahnya tingkat pelaporan kasus pelecehan seksual di tempat kerja, karena korban menilai risiko yang dihadapi lebih besar dibandingkan manfaat melapor.

Sebagai respon atas maraknya kekerasan terhadap perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Declaration on the Elimination of Violence against Women* (DEVAW) pada tahun 1993. Deklarasi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan (United Nations, 1993). DEVAW menuntut negara untuk bertanggung jawab melalui pencegahan, penanganan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku, serta menolak penggunaan alasan budaya patriarki sebagai pembenaran atas pembiaran kekerasan terhadap perempuan.

Dalam ranah ketenagakerjaan, International Labour Organization (ILO) kemudian mengesahkan *Violence and Harassment Convention No. 190* (C190) pada tahun 2019 sebagai instrumen hukum internasional pertama yang secara eksplisit

mengakui hak setiap pekerja atas lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk pelecehan seksual berbasis gender (ILO, 2019). Konvensi ini memberikan perlindungan lintas status kerja dan menekankan pentingnya pencegahan serta mekanisme penanganan yang berpihak pada korban. Namun, meskipun kerangka hukum internasional telah tersedia, praktik kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja masih sulit diungkap.

Survei global yang dilakukan oleh ILO, *Lloyd's Register Foundation*, dan Gallup menunjukkan bahwa satu dari lima pekerja di dunia pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, dengan perempuan sebagai kelompok paling rentan (ILO, 2022). Mayoritas kasus terjadi pada lima tahun pertama masa kerja dan sebagian besar tidak pernah dilaporkan ke lembaga formal. Rendahnya pelaporan disebabkan oleh ketakutan akan stigma, ketidakpercayaan terhadap institusi, serta kekhawatiran terhadap dampak negatif pada reputasi dan karier korban.

Kondisi tersebut juga tercermin di Indonesia. Meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjamin hak perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban, kasus kekerasan dan

pelecehan seksual di tempat kerja masih tergolong tinggi. Survei ILO di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dan individu non-biner memiliki tingkat kerentanan paling tinggi sebagai korban, terutama di lingkungan kerja yang didominasi laki-laki (ILO, 2022). Bentuk pelecehan yang paling sering dialami adalah komentar bernuansa seksual, tatapan tubuh, sentuhan tanpa persetujuan, hingga intimidasi seksual dengan mekanisme *quid pro quo*.

Mayoritas pelaku berasal dari atasan atau rekan kerja yang memiliki posisi lebih tinggi, yang menegaskan bahwa relasi kuasa struktural menjadi faktor utama terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja (MacKinnon, 1979). Ketimpangan ini memengaruhi respons korban, di mana sebagian besar memilih untuk diam atau hanya menceritakan kepada orang terdekat. Praktik *victim blaming* dan pelabelan negatif terhadap korban semakin memperkuat budaya bungkam yang melanggengkan kekerasan seksual.

Pelabelan negatif yang diterima oleh korban merupakan manifestasi dari seksisme, yaitu prasangka berbasis gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak inferior. Glick dan Fiske (1996) menjelaskan bahwa seksisme bekerja secara ambivalen melalui dua bentuk

utama, yakni *hostile sexism* dan *benevolent sexism*, yang saling melengkapi dalam melanggengkan dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Seksisme inilah yang membuat perempuan korban pelecehan seksual kerap disalahkan, diragukan kredibilitasnya, serta dianggap sebagai pihak pemicu terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual.

Akibat kuatnya seksisme sistemik tersebut, korban sering kali menginternalisasi rasa malu, takut, dan bersalah, sehingga semakin terisolasi dan enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya (Lips, 1988). Dalam konteks ini, media massa memiliki peran strategis untuk merekonstruksi realitas sosial dan membentuk kesadaran publik mengenai kekerasan berbasis gender. Film sebagai salah satu bentuk media massa memiliki kemampuan untuk merepresentasikan realitas sosial sekaligus membangun perspektif baru bagi masyarakat (Wahyuni, 2019).

Film *She Said* (2022) merupakan salah satu representasi media yang mengangkat isu kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja, khususnya dalam industri film Hollywood yang didominasi laki-laki. Film ini mengisahkan perjuangan jurnalis perempuan *The New York Times* dalam mengungkap kasus pelecehan seksual yang dilakukan Harvey Weinstein,

serta menyoroti hambatan struktural, ancaman, dan tekanan seksis yang dihadapi korban maupun jurnalis perempuan.

Melalui narasi “perempuan untuk perempuan,” film ini memperlihatkan pentingnya solidaritas, keberanian, dan dukungan kolektif dalam melawan budaya seksis yang selama ini melindungi pelaku. Oleh karena itu, *She Said* menjadi objek kajian yang relevan untuk memahami bagaimana media film merepresentasikan resistensi tokoh perempuan terhadap seksisme sistemik, serta bagaimana representasi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi dan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual terhadap perempuan di dunia kerja serta melihat bentuk seksisme sistemik yang telah dinormalisasi di kehidupan masyarakat sosial.

RUMUSAN MASALAH

Meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang melindungi pekerja perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual, praktik diskriminasi berbasis gender masih banyak terjadi di dunia kerja dan sering kali tidak dilaporkan akibat seksisme sistemik. Film *She Said* (2022) merepresentasikan realitas tersebut melalui penggambaran pengalaman perempuan korban pelecehan seksual dan jurnalis

perempuan yang menghadapi tekanan relasi kuasa dan sikap seksis. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana representasi resistensi tokoh perempuan terhadap seksisme sistemik dalam film *She Said* (2022).

TUJUAN PENELITIAN

Melalui paparan di pendahuluan dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi resistensi tokoh perempuan terhadap seksisme sistemik dalam film *She Said* (2022).

KERANGKA TEORI

Teori Sudut Pandang

Teori sudut pandang (*standpoint theory*) merupakan pendekatan kritis yang berangkat dari gagasan bahwa pengetahuan sosial dibentuk oleh posisi sosial individu atau kelompok dalam struktur masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pengalaman hidup kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, menyediakan sudut pandang yang unik dan penting untuk memahami realitas sosial secara lebih utuh (Harding, 2004). Dalam konteks masyarakat patriarkis, pengalaman perempuan sering kali diabaikan atau dimarginalkan dalam produksi pengetahuan yang didominasi oleh perspektif kelompok berkuasa.

Menurut *standpoint theory*, sudut pandang perempuan terbentuk melalui

pengalaman konkret yang berkaitan dengan relasi kuasa, pembagian peran gender, serta praktik ketidakadilan struktural yang mereka alami sehari-hari. Oleh karena itu, pengetahuan yang dihasilkan dari sudut pandang perempuan tidak bersifat netral, melainkan reflektif dan kritis terhadap struktur sosial yang menindas (Hartsock, 1983). Teori ini menolak klaim objektivitas universal yang mengabaikan perbedaan pengalaman sosial dan justru menegaskan bahwa objektivitas yang lebih kuat dapat dicapai dengan memasukkan perspektif kelompok marginal.

Dalam kajian media dan gender, teori sudut pandang digunakan untuk menganalisis bagaimana pengalaman perempuan direpresentasikan serta bagaimana suara mereka dinegosiasikan dalam narasi media. Pendekatan ini membantu mengungkap bias patriarkis dalam representasi media sekaligus menyoroti upaya perempuan untuk merebut ruang bicara dan membangun makna dari pengalaman mereka sendiri. Dengan demikian, teori sudut pandang relevan untuk memahami bagaimana perempuan memaknai, merepresentasikan, dan melawan seksisme sistemik dalam berbagai bentuk representasi media.

Teori Seksisme Ambivalen

Seksisme merupakan bentuk prasangka atau diskriminasi yang didasarkan pada gender, yang berakar pada keyakinan bahwa satu jenis kelamin lebih superior dibandingkan jenis kelamin lainnya. Dalam masyarakat patriarkis, seksisme umumnya menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat, sehingga membatasi ruang gerak, pilihan, serta potensi perempuan dalam berbagai ranah kehidupan sosial (Doob, 2021). Berbeda dari pandangan tradisional yang memaknai seksisme hanya sebagai sikap permusuhan terhadap perempuan, Glick dan Fiske (1996) memperkenalkan konsep seksisme ambivalen (*ambivalent sexism*) yang menekankan bahwa seksisme bekerja melalui dua bentuk yang saling melengkapi, yakni *hostile sexism* dan *benevolent sexism*.

Hostile sexism merujuk pada sikap seksis yang bersifat terbuka, agresif, dan bermusuhan terhadap perempuan, terutama terhadap perempuan yang dianggap menentang peran gender tradisional. Bentuk seksisme ini menampilkan perempuan sebagai ancaman, tidak kompeten, manipulatif, atau tidak layak menduduki posisi setara dengan laki-laki. *Hostile sexism* sering kali melegitimasi praktik diskriminasi, pelecehan verbal, intimidasi, hingga kekerasan seksual,

karena perempuan diposisikan sebagai objek yang dapat dikontrol atau dihukum ketika tidak patuh terhadap norma patriarkis (Glick & Fiske, 1996; Begany & Milburn, 2002).

Sementara itu, *benevolent sexism* merupakan bentuk seksisme yang lebih halus dan terselubung, karena dibungkus dalam sikap yang tampak positif, seperti perlindungan, penghormatan, dan romantisasi terhadap perempuan. Dalam bentuk ini, perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah, suci, emosional, dan membutuhkan perlindungan laki-laki. Meskipun terlihat halus, *benevolent sexism* tetap bersifat opresif karena membatasi perempuan dalam peran gender tradisional, seperti istri, ibu, dan pengasuh, serta menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama (Cross & Overall dalam Mastari et al., 2019). Dengan demikian, seksisme benevolensi justru memperkuat ketergantungan perempuan pada laki-laki dan melanggengkan ketimpangan gender.

Glick dan Fiske (1996) menjelaskan bahwa seksisme ambivalen bekerja melalui tiga komponen utama, yaitu paternalisme, diferensiasi gender, dan heteroseksualitas. Paternalisme mencakup paternalisme dominan (*hostile*) yang menuntut kepatuhan perempuan, serta paternalisme protektif (*benevolent*) yang membenarkan dominasi laki-laki atas nama perlindungan.

Diferensiasi gender meliputi diferensiasi kompetitif (*hostile*) yang menganggap laki-laki lebih unggul secara kemampuan, serta diferensiasi komplementer (*benevolent*) yang menegaskan pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, heteroseksualitas mencakup permusuhan heteroseksual (*hostile*) yang memandang perempuan sebagai objek seksual, serta keintiman heteroseksual (*benevolent*) yang meromantisasi perempuan sebagai pelengkap laki-laki.

Melalui konsep seksisme ambivalen, dapat dipahami bahwa seksisme hadir dalam bentuk kekerasan atau kebencian yang eksplisit sekaligus melalui praktik sosial yang tampak wajar dan diterima secara budaya (dinormalisasikan). Kedua bentuk seksisme tersebut saling melengkapi dalam mempertahankan struktur patriarki dan menjadikan subordinasi perempuan sebagai sesuatu yang normal. Dalam konteks kekerasan dan pelecehan seksual, seksisme ambivalen berperan besar dalam membuat korban terisolasi, memperkuat praktik *victim blaming*, serta menghambat perempuan untuk melakukan perlawanan dan menuntut keadilan.

Resistensi

Resistensi merujuk pada berbagai bentuk tindakan yang dilakukan individu

atau kelompok untuk menentang, menegosiasikan, atau melawan struktur kekuasaan yang bersifat menindas. Dengan demikian, resistensi dipahami sebagai praktik sosial yang muncul sebagai respons atas ketimpangan relasi kuasa.

James C. Scott (1985) membedakan resistensi ke dalam dua bentuk utama, yaitu resistensi terbuka (*public transcript*) dan resistensi tertutup (*hidden transcript*). Resistensi terbuka merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan secara langsung dan terlihat oleh pihak berkuasa, seperti protes, penolakan, atau pengungkapan ketidakadilan secara publik. Sementara itu, resistensi tertutup dilakukan secara tidak langsung dan kerap bersifat simbolik, seperti diam strategis, penghindaran, sindiran, atau upaya mempertahankan martabat diri di bawah tekanan kekuasaan.

Dalam konteks relasi sosial yang timpang, terutama yang melibatkan gender, resistensi menjadi cara bagi kelompok subordinat untuk mempertahankan agensi dan identitasnya. Oleh karena itu, teori resistensi relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan merespons dan melawan praktik penindasan, termasuk kekerasan dan seksisme sistemik, baik melalui tindakan kolektif maupun strategi individual.

Aliran Feminis Radikal

Feminisme radikal merupakan salah satu aliran utama dalam kajian feminisme yang memandang penindasan terhadap perempuan sebagai persoalan struktural yang berakar pada sistem patriarki. Aliran ini menegaskan bahwa patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan dan perempuan sebagai kelompok subordinat dalam hampir seluruh aspek kehidupan, baik di ranah domestik maupun publik (Tong, 2009). Feminis radikal menuntut adanya perubahan mendasar terhadap struktur sosial yang melanggengkan dominasi laki-laki.

Pemikir feminis radikal seperti Kate Millett menekankan bahwa relasi personal bersifat politis (*the personal is political*), artinya pengalaman pribadi perempuan, termasuk kekerasan, pelecehan seksual, dan kontrol atas tubuh, merupakan manifestasi dari seksisme yang bersifat sistemik. Dalam perspektif ini, kekerasan seksual dipahami sebagai kontrol sosial yang digunakan untuk mempertahankan dominasi laki-laki atas perempuan. Isu seksualitas dan tubuh perempuan merupakan fokus utama dalam feminisme radikal.

Feminisme radikal juga mengkritik institusi sosial dan budaya yang mereproduksi ketimpangan gender, seperti

keluarga, media, dan industri budaya. Aliran ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif, solidaritas perempuan, serta pembongkaran norma dan nilai yang menormalisasi penindasan berbasis gender. Dengan demikian, feminisme radikal memberikan kerangka kritis untuk memahami akar kekerasan dan seksisme sistemik, sekaligus menegaskan perlunya transformasi sosial yang fundamental dalam upaya membebaskan perempuan dari belenggu seksisme sistemik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan realitas sosial yang ada dalam film *She Said* (2022). Lalu, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis.

Objek penelitian berupa film *She Said* (2022) yang dianalisis sebagai teks budaya. Subjek penelitian difokuskan pada tokoh-tokoh perempuan utama dalam film yang mengalami dan merespons praktik seksisme di lingkungan kerja. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa adegan, dialog, gestur, ekspresi visual, serta unsur sinematik yang merepresentasikan seksisme dan resistensi perempuan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, jurnal

ilmiah, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan kajian gender, seksisme, dan media.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi teks film secara mendalam dengan cara menonton film berulang kali, mencatat adegan-adegan penting, serta mengklasifikasikan data sesuai fokus penelitian. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teknik analisis semiotika John Fiske yang mencakup tiga level pengkodean, yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Melalui tahapan ini, peneliti mengkaji bagaimana tanda-tanda dalam film film *She Said* (2022) membangun makna serta merepresentasikan resistensi yang dilakukan oleh tokoh perempuan terhadap seksisme sistemik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Terdapat 10 adegan terpilih yang merepresentasikan mengenai resistensi tokoh perempuan terhadap seksisme sistemik dalam film *She Said* (2022), yakni adegan 23, 26, 28, 41, 42, 46, 48, 57, 60, dan 69. 10 adegan tersebut dianalisis menggunakan metode analisis semiotika John Fiske yang terbagi dalam tiga level pengkodean, yakni level realitas, level representasi, dan level ideologi.

Pada level realitas, 10 adegan dianalisis melalui aspek penampilan, busana, tata rias, tingkah laku, ekspresi, gaya bicara, gestur, dan lingkungan.

Dalam aspek penampilan, tokoh perempuan didominasi oleh bentuk tubuh ektomorfik yang secara fisik sering diasosiasikan dengan kerapuhan, namun justru memperlihatkan keberanian dan kekuatan psikologis dalam melakukan resistensi terhadap budaya seksis. Ketidaksesuaian antara ciri fisik dan sikap mental ini merepresentasikan bahwa keberanian perempuan tidak ditentukan melalui penampilan fisiknya.

Pada aspek busana, warna pakaian yang digunakan tokoh perempuan didominasi oleh warna putih, hijau, dan ungu yang secara historis merupakan simbol perlawanan perempuan dalam International Woman's Day. Pemaknaan ini berakar pada gerakan Women's Social and Political Union (WSPU) di Inggris pada tahun 1908, yang menjadikan hijau sebagai simbol harapan dan pembaruan, putih sebagai lambang kemurnian dan kebebasan perempuan, serta ungu sebagai simbol kesetaraan gender, solidaritas, dan pemberdayaan perempuan.

Pada aspek tata rias, tokoh perempuan ditampilkan menggunakan tata rias korektif dengan teknik natural dan

bold. Teknik natural digunakan untuk menampilkan kesan apa adanya dan netral, yang dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap tuntutan masyarakat patriarkal yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Sementara itu, teknik *bold* merepresentasikan keberanian dan ketegasan tokoh dalam melawan tindakan dan budaya seksis.

Dari aspek tingkah laku, seksisme yang dominan muncul berbasis heteroseksualitas, baik dalam bentuk *hostile sexism* maupun *benevolent sexism* (Glick & Fiske, 1996). Sebagai respons, tokoh perempuan lebih banyak melakukan resistensi terbuka, seperti konfrontasi langsung, investigasi jurnalistik, kampanye hak perempuan, pencarian perlindungan hukum, serta keberanian untuk bersuara di media massa. Hal ini diperkuat melalui aspek ekspresi, di mana ekspresi marah menjadi dominan sebagai luapan emosi atas ketidakadilan yang lama dipendam, menandai transformasi korban dari posisi pasif menjadi subjek yang aktif melakukan perlawanan.

Pada aspek gaya bicara, penggunaan gaya bicara asertif menunjukkan kemauan kuat tokoh perempuan untuk bersaksi dan menghentikan seksisme sistemik. Sementara itu, gestur tangan, seperti mengepal, menunjuk, atau menggebrak

meja, memvisualisasikan emosi dan resistensi secara *non-verbal*, sehingga makna perlawanan tersampaikan lebih kuat. Terakhir, aspek lingkungan yang didominasi suasana sepi menegaskan perlindungan terhadap privasi korban, dan menciptakan ruang aman bagi perempuan untuk bersuara serta melawan ketidakadilan yang mereka alami.

Dengan demikian, pada level realitas, film *She Said* (2022) menampilkan pengalaman konkret perempuan dalam menghadapi seksisme dan kekerasan seksual di lingkungan kerja yang memiliki budaya seksis. Realitas tersebut diwujudkan melalui ekspresi emosional, gestur, dialog, dan pilihan lingkungan yang mencerminkan posisi perempuan sebagai kelompok subordinat. Resistensi perempuan muncul baik dalam bentuk resistensi tertutup maupun resistensi terbuka, yang menunjukkan bahwa pengalaman personal menjadi fondasi awal lahirnya perlawanan terhadap seksisme sistemik.

Pada level representasi, 10 adegan dianalisis melalui kode-kode teknis seperti kamera, musik, penyuntingan, dan tata cahaya.

Pada aspek kamera, film *She Said* (2022) menunjukkan kecenderungan penggunaan kombinasi *long shot*, *medium*

close up, dan *close up*, khususnya dalam adegan wawancara antara jurnalis dan korban atau saksi. *Long shot* berfungsi membingkai latar dan suasana, *medium close up* menekankan gestur serta ekspresi tokoh, sementara *close up* digunakan untuk menangkap gejolak emosi secara lebih intens. Dominasi *eye level angle* membuat tokoh berada sejajar dengan audiens sehingga ekspresi dan gestur dapat diikuti secara jelas, sedangkan *over shoulder angle* memungkinkan audiens memahami dinamika emosional antar tokoh. Pergerakan kamera berupa *following* dan *zooming* membantu memfokuskan perhatian penonton dan menegaskan konteks serta resistensi yang dilakukan tokoh (Brown, 2016).

Pada aspek musik, penggunaan *diegetic sound* yang didominasi dialog tokoh perempuan menjadi elemen utama. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memperoleh otoritas atas suara dan narasinya sendiri. Kondisi tersebut berlawanan dengan konsep *The Acoustic Mirror* yang dikemukakan Silverman (dalam Vernon et al., 2016), yang menyatakan bahwa suara perempuan dalam sinema klasik sering berada dalam posisi subordinat. Dengan demikian, dominasi dialog perempuan dalam film ini dapat dimaknai sebagai bentuk resistensi terhadap subordinasi suara perempuan.

Pada aspek penyuntingan, *continuity editing* dengan teknik *shot/reverse shot* mendominasi untuk menegaskan ekspresi dan gestur dalam dialog, sementara penggunaan *discontinuity editing* berupa *dissolve* berfungsi membawa penonton pada ingatan traumatis masa lalu dan memperlihatkan perjuangan psikologis tokoh dalam melawan budaya seksis. Sementara itu, aspek pencahayaan memadukan *available light* dan *artificial light* dengan nuansa putih dan biru muda yang lembut, yang diasosiasikan dengan ketenangan, kepercayaan, dan harapan.

Secara keseluruhan, pada level representasi, film *She Said* (2022) mengonstruksikan resistensi perempuan melalui pemanfaatan kode-kode teknis sinematik yang berpihak pada korban dan jurnalis perempuan. Perempuan ditampilkan sebagai subjek aktif yang berdaya, dengan penekanan pada ekspresi emosional, suara, dan solidaritas, sehingga narasi resistensi terhadap seksisme sistemik disampaikan secara empatik, realistis, dan berperspektif gender.

Pada level ideologi, hasil analisis level realitas dan level representasi dalam film *She Said* (2022) menunjukkan adanya ideologi dominan patriarki-kapitalis yang melanggengkan seksisme sistemik di lingkungan kerja. Pengalaman tokoh

perempuan dalam menghadapi pelecehan seksual, pengabaian suara korban, serta ketimpangan relasi kuasa mencerminkan bagaimana seksisme beroperasi secara struktural, baik dalam bentuk *hostile sexism* maupun *benevolent sexism* (Glick & Fiske, 1996). Seksisme tersebut menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat yang terisolasi, disalahkan, dan dipaksa diam demi menjaga stabilitas institusi dan kepentingan ekonomi.

Seksisme dalam film ini berakar pada struktur patriarki yang telah terinstitusionalisasi. Frye (1983) memandang seksisme sebagai bagian dari sistem penindasan yang membentuk cara pandang, bahasa, dan praktik sosial, sehingga perspektif laki-laki dianggap sebagai standar, sementara pengalaman perempuan dipinggirkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Walby (1989) yang menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui berbagai struktur, terutama patriarki dalam budaya dan kekerasan laki-laki, sebagaimana terlihat dalam normalisasi pelecehan seksual dan delegitimasi suara korban dalam ruang publik dan media.

Ideologi patriarki tersebut diperkuat oleh kapitalisme yang menempatkan keuntungan dan stabilitas industri di atas keselamatan serta martabat pekerja perempuan. Kapitalisme mereduksi

pengalaman perempuan menjadi masalah personal, mengobjektifikasi tubuh perempuan, serta memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa untuk mempertahankan kontrol dan disiplin terhadap pekerja perempuan. Dalam konteks ini, seksisme berfungsi sebagai alat ideologis untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam sistem produksi dan industri media.

Sebagai respons terhadap ideologi dominan tersebut, film *She Said* menghadirkan ideologi tandingan berupa feminisme radikal dan jurnalisme berperspektif gender. Perlawanan yang ditampilkan melalui keberanian korban dan jurnalis perempuan dalam mengungkap kebenaran menunjukkan upaya membongkar akar struktural seksisme sistemik. Dengan demikian, pada level ideologi, film ini menegaskan kritik terhadap patriarki-kapitalisme sekaligus menawarkan alternatif ideologis berupa resistensi kolektif, solidaritas perempuan, dan komitmen media dalam memperjuangkan keadilan gender.

Pembahasan

Seksisme Sistemik dalam Masyarakat Budaya Patriarkal-Kapitalis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sepuluh adegan terpilih dalam film *She Said* (2022) secara dominan

merepresentasikan praktik seksisme heteroseksualitas, baik dalam bentuk *hostile sexism* maupun *benevolent sexism* (Glick & Fiske, 1996). Seksisme tersebut beroperasi dalam kerangka ideologi patriarki dan kapitalisme yang saling berkolaborasi, sehingga menempatkan perempuan secara konsisten dalam posisi subordinat. Hal ini tampak dari pengalaman tokoh perempuan yang mengalami pelecehan seksual, pembungkaman, serta tekanan psikologis setelah berupaya bersuara. Mengacu pada Sylvia Walby (1989), praktik-praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari struktur patriarki dalam budaya (*patriarchal culture*), di mana ketimpangan gender dinormalisasi melalui nilai dan norma sosial. Serta patriarki dalam kekerasan laki-laki, di mana tindak kekerasan terhadap perempuan digunakan untuk mempertahankan dominasi laki-laki.

Dalam budaya patriarkal, seksisme bekerja secara ambivalen. *Benevolent sexism* hadir dalam bentuk perlindungan dan penghormatan semu yang membatasi perempuan dalam peran tradisional, sementara *hostile sexism* muncul ketika perempuan menolak subordinasi tersebut dan dianggap sebagai ancaman. Kedua bentuk ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, sehingga seksisme dapat hadir baik sebagai

kekerasan terbuka maupun praktik budaya yang tampak wajar. Pengalaman Rowena Chu memperlihatkan bagaimana seksisme berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membuat korban terisolasi dan menanggung beban psikologis secara individual, bahkan hingga muncul keinginan bunuh diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa seksisme telah mengakar sebagai praktik budaya yang menyakiti perempuan secara sistemik.

Ideologi kapitalisme memperparah dominasi patriarki dengan memprioritaskan stabilitas institusi, citra perusahaan, dan keuntungan ekonomi di atas keadilan gender. Tubuh dan pengalaman perempuan diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dikorbankan demi kepentingan kelompok dominan. Seksisme dalam konteks ini berfungsi sebagai alat ideologis yang menjaga hierarki kekuasaan tetap stabil dan mencegah konflik struktural muncul ke permukaan. Sejalan dengan pandangan Marilyn Frye (1983), seksisme merupakan bagian dari struktur penindasan sistemik yang membentuk cara pandang masyarakat, di mana perspektif laki-laki dijadikan standar sementara pengalaman perempuan terpinggirkan.

Sebagai respons terhadap budaya seksis tersebut, film *She Said* menampilkan resistensi perempuan, yang menurut Scott merupakan upaya kelompok subordinat

untuk menentang klaim kelompok dominan. Dari sepuluh adegan terpilih, bentuk resistensi yang paling dominan adalah resistensi terbuka, seperti konfrontasi langsung, pencarian perlindungan hukum, kampanye, dan kerja jurnalistik investigatif. Resistensi ini efektif ketika dilakukan secara kolektif, sedangkan resistensi terbuka yang dilakukan secara individual cenderung diabaikan. Hal ini menegaskan pentingnya kesadaran kritis gender (Freire, 1970) agar perempuan memahami bahwa diskriminasi yang dialami bersifat struktural.

Upaya pembebasan dari seksisme juga menuntut perubahan struktural, termasuk redistribusi kerja domestik (Hochschild, 1983), dekonstruksi representasi budaya yang bias gender (Hall, 1997), serta penguatan solidaritas perempuan atau *sisterhood*. Dalam konteks ini, film *She Said* merepresentasikan kritik terhadap seksisme patriarki-kapitalis sekaligus menegaskan pentingnya kolektivitas dan solidaritas perempuan sebagai strategi perlawanan terhadap seksisme sistemik yang telah dinormalisasi dalam budaya sosial.

Sudut Pandang Perempuan dalam Melakukan Perlawanan

Resistensi perempuan terhadap seksisme hadir dalam spektrum yang luas,

mulai dari praktik sehari-hari yang bersifat terselubung hingga perlawanan terbuka yang terorganisasi. Patricia Hill Collins (1990) menjelaskan bahwa pengalaman perempuan, khususnya kelompok terpinggirkan, melahirkan *oppositional knowledge*, yakni pengetahuan tandingan yang memungkinkan perempuan mengenali dan menantang bentuk penindasan yang sebelumnya dinormalisasi.

Teori sudut pandang (*standpoint theory*) menegaskan bahwa pengalaman hidup perempuan membentuk kesadaran kritis yang menjadi dasar resistensi terhadap seksisme. Pengetahuan yang bersumber dari pengalaman kolektif perempuan memungkinkan mereka membongkar struktur sosial patriarkal-kapitalis yang menindas. Sejalan dengan Nancy Hartsock (1983), kesadaran feminis berkembang ketika perempuan merefleksikan pengalaman hidupnya secara kolektif, sehingga melahirkan solidaritas dan kesadaran akan ketimpangan relasi kuasa yang perlu dilawan secara struktural.

Hasil analisis terhadap sepuluh adegan terpilih dalam film *She Said* (2022) menunjukkan bahwa tokoh-tokoh perempuan melakukan resistensi sesuai dengan pengalaman dan kapasitas masing-masing. Jodi Kantor melakukan resistensi melalui kerja jurnalistik investigatif,

Rowena Chu melalui keberanian berbagi cerita, Ashley Judd melalui kampanye advokasi, serta Laura Madden dengan membuka suara di media. Meskipun bentuk resistensinya beragam, tujuan yang mereka miliki sama, yakni membongkar seksisme sistemik hingga ke akar permasalahannya.

Berdasarkan temuan penelitian, bentuk resistensi yang paling dominan adalah resistensi terbuka, sebagaimana dikemukakan Scott (1985), yakni perlawanan yang dilakukan secara terang-terangan melalui media dan ruang publik. Dominannya resistensi terbuka menunjukkan bahwa kesadaran kolektif, solidaritas perempuan, dan keberanian bersuara di ruang publik menjadi strategi efektif dalam menantang seksisme sistemik, sebagaimana tercermin dalam lahirnya gerakan #MeToo.

Resistensi yang ditampilkan dalam film ini dapat dipahami sebagai praktik feminisme, khususnya feminisme radikal. Feminisme radikal memandang patriarki dan seksisme sebagai akar utama penindasan perempuan dan menuntut perubahan sistemik yang menyeluruh (Tong, 2009). Praktik *consciousness-raising* terlihat melalui keberanian perempuan untuk bersaksi dan menyadari bahwa pengalaman yang dianggap personal sesungguhnya bersifat kolektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis semiotika yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa film *She Said* (2022) merepresentasikan berbagai bentuk resistensi yang dilakukan tokoh perempuan terhadap perilaku seksis yang mereka alami. Representasi tersebut dianalisis melalui tiga level pemaknaan, yakni level realitas, level representasi, dan level ideologi. Pada level realitas, resistensi terhadap seksisme sistemik ditampilkan melalui delapan aspek utama, yaitu penampilan, busana, tata rias, perilaku, ekspresi, tindak tutur, gestur, dan lingkungan. Aspek-aspek tersebut memperlihatkan pengalaman konkret perempuan dalam menghadapi seksisme dan pelecehan seksual di ruang kerja yang didominasi laki-laki. Selanjutnya, level representasi mempertegas makna resistensi tersebut melalui pemanfaatan kode-kode teknis sinematik, seperti penggunaan kamera, musik, penyuntingan, dan pencahayaan yang berpihak pada korban serta menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk seksisme yang dialami tokoh perempuan bersifat ambivalen, yakni berupa *hostile sexism* dan *benevolent*

sexism. Tokoh perempuan dalam film mengalami kombinasi kedua bentuk seksisme tersebut, dengan dominasi seksisme berbasis heteroseksualitas, baik dalam bentuk bermusuhan maupun yang dibungkus dengan perlindungan semu. Dominasi seksisme heteroseksualitas ini mengindikasikan bahwa tubuh dan seksualitas perempuan masih dijadikan objek dalam sistem sosial yang berideologi patriarki-kapitalis, guna mempertahankan relasi kuasa dan dominasi kelompok laki-laki.

Berdasarkan keterkaitan antara level realitas dan level representasi, dapat disimpulkan bahwa film *She Said* merefleksikan ideologi dominan patriarki-kapitalis yang masih mengakar kuat dalam masyarakat. Ideologi tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk resistensi perempuan sebagai upaya membebaskan diri dari seksisme sistemik. Resistensi yang ditampilkan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu resistensi terbuka dan resistensi tertutup. Resistensi terbuka diwujudkan melalui investigasi jurnalistik, konfrontasi langsung dengan pelaku, pencarian perlindungan hukum, kampanye penuntutan hak-hak perempuan, serta keberanian bersuara di media massa. Sementara itu, resistensi tertutup ditampilkan melalui tindakan berbagi pengalaman secara privat sebagai bentuk

perlindungan diri dan negosiasi dalam situasi yang represif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sineas berusaha menampilkan ideologi tandingan terhadap ideologi dominan yang ada, yakni ideologi feminis dan praktik jurnalistik berbasis gender.

Refleksi penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi ketidaksetaraan gender yang bersumber dari kuatnya budaya patriarki dan kapitalisme, terutama di sektor kerja publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk resistensi yang paling dominan dan efektif adalah resistensi terbuka yang dilakukan secara kolektif melalui media massa. Resistensi terbuka yang dilakukan secara individual cenderung kurang mampu menghentikan seksisme sistemik. Oleh karena itu, film ini menegaskan pentingnya kesadaran kolektif, solidaritas antarperempuan, dan gerakan bersama, seperti gerakan #MeToo, sebagai strategi utama untuk membongkar dan melawan seksisme sistemik yang telah dinormalisasi dalam struktur sosial patriarki-kapitalis.

Saran

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika John Fiske, teori sudut pandang (*standpoint theory*), serta aliran feminisme radikal untuk menganalisis dan

merefleksikan resistensi perempuan terhadap seksisme sistemik dalam film *She Said* (2022). Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya memvariasikan penggunaan teori feminis serta mengkaji pemaknaan khalayak terhadap isu seksisme dalam media, mengingat penelitian ini masih berfokus pada analisis teks yang bersifat subjektif.

Dari aspek praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi sineas dan pelaku industri film agar lebih sensitif dalam merepresentasikan perempuan dan isu gender dalam film. Film bertema kesetaraan gender seharusnya tidak mereproduksi subordinasi antarperempuan, dan seharusnya lebih menonjolkan adanya solidaritas, dukungan, dan kerja sama sebagai bentuk resistensi kolektif terhadap struktur budaya yang membuat perempuan berada dalam posisi subordinat. Dengan demikian, film dapat berperan sebagai medium edukatif yang mendorong audiens untuk bersikap lebih empatik terhadap pengalaman perempuan sebagai kelompok subordinat.

Sementara itu, dari aspek sosial, penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran kritis masyarakat dalam membaca teks media sebagai representasi realitas dan ideologi yang hidup dalam budaya sosial. Film *She Said* (2022) memperlihatkan nilai *sisterhood* dan

solidaritas perempuan sebagai strategi efektif dalam melawan seksisme sistemik. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya perempuan, diharapkan lebih peka terhadap isu seksisme yang ada di sekitarnya, saling berbagi pengalaman, serta membangun dukungan kolektif sebagai langkah awal menuju pembebasan dari seksisme sistemik yang telah mengakar di struktur budaya sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, B. (2016). *Cinematography: Theory and Practice* (3rd ed.). Taylor & Francis.
- Doob, Christopher B. (2021). *Poverty, Racism, and Sexism: The Reality of Oppression in America, (First)*. UK: Routledge.
- Farley, Lin. (1978) *Sexual Shakedown: The Sexual Harassment of Women on the Job*. New York: McGraw-Hill.
- Fiske, John. (1987). *Television Culture: Popular, Pleasure, and Politics. In Television Culture: Second Edition*. Routledge
- Freire, Paulo. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: The Seabury Press.
- Frye, Marilyn. (1983). *The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory*. Crossing Press.
- Glick, Peter, Susan T. Fiske. (1996). *The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating Hostile and Benevolent Sexism*. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 70 (3): 491-494.
- Hochschild, A. R. (1983). *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Hall, Stuart. (1997). *Representation:*

- Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications & Open University.
- Harding, S. (2004). *The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies*. Psychology Press.
- Hartsock, N.C.M. (1983). *The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism*. In: Harding, S., Hintikka, M.B. (eds) *Discovering Reality*. Synthese Library, vol 161. Springer, Dordrecht.
https://doi.org/10.1007/0-306-48017-4_15.
- Ilo-Gallup Report. (2022). Experiences of violence and harassment at work: A global first survey. Diakses dari <https://www.ilo.org/publications/major-publications/experiences-violence-and-harassment-work-global-first-survey>
- Indonesia. *Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- International Labour Organization. (2022). *Semua Bisa Kena: Survei Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja Indonesia 2022*. Diakses dari https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2022/09/Fact_Sheet_-_Semua_bisa_kena_ILO-x-NOP-2022.pdf.
- Lips, Hillary M. (1998). *Sex and Gender an Introduction*. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company.
- Mastari, Laora, Spruyt, Siongers. (2019). *Benevolent and Hostile Sexism in Social Spheres: The Impact of Parents, School, and Romance on Belgian Adolescents' Sexist Attitudes*. Journal Frontiers in Sociology. Vol. 4 (47).
- MacKinnon, C.A. (1979). *Sexual Harassment of Working Women*. Yale University Press, New Haven.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons Of The Weak: Everyday Forms Of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- U.S. EEOC. (2022). *2022 Annual Performance Report (APR)*. Diakses dari <https://www.eeoc.gov/2022-annual-performance-report-apr>
- Tong, Rosemarie. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Press.
- U.S. EEOC. (2022). *2022 Annual Performance Report (APR)*. Diakses dari <https://www.eeoc.gov/2022-annual-performance-report-apr>.
- U.S. EEOC. Title VII of the Civil Rights Act of 1964. Diakses dari <https://www.eeoc.gov/statutes/title-vii-civil-rights-act-1964>.
- Vernon, K. M., Hole, K. L., Jelača, D., Kaplan, E. A., & Petro, P. (2016). *The Routledge companion to cinema and gender. The Routledge Companion to Cinema and Gender*, 1–492.
<https://doi.org/10.4324/9781315684062>
- Walby, S. (1989). *Theorising Patriarchy*. <https://doi.org/10.1177/0038038589023002004> 23(2), 213–234.